

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adnan, Indra Muchlis. *Negara Hukum Dan Demokrasi Dinamika Negara Hukum Dalam Sistem Demokrasi Pancasila Di Indonesia*. Bantul: Trussmedia Grafika, 2019.
- Andriyan, Dody Nur. *Hukum Tata Negara Dan Sistem Politik Kombinasi Presidensial Dengan Multiparatai Di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- AZ, Lukman Santoso. *Negara Hukum Dan Demokrasi: Pasang Surut Negara Hukum Indonesia Pasca Reformasi*. Ponorogo: IAIN Po Press, 2016.
- Azhary. *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1995.
- Bachtiar, Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Pamulang Tangerang Selatan: Unpam Press, 2019.
- Chaidir, Ellydar. *Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar 1945*. Yogyakarta: Total Media, 2008.
- Dahlan Thaib, Dkk. *Teori Dan Hukum Konstitusi*. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Isra, Saldi. "Hubungan Presiden Dan DPR." *Jurnal Konstitusi* 10 (2013).
- . *Lembaga Negara Konsep, Sejarah, Wewenang, Dan Dinamika Konstitusional*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2020.
- . *Sistem Pemerintahan Indonesia Pergulatan Ketatanegaraan Menuju Sistem Pemerintahan Presidensial*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2020.
- Jamaludin Ghafur, Allan Fatchan Gani Wardhana. *Presidential Threshold Sejara, Konsep, Dan Ambang Batas Persyaratan Pencalonan Dalam Tata Hukum Di Indonesia*. Malang: Setara Press, 2019.
- Mahmuzar. *Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen*. Bandung: Nusa Media, 2013.
- MD, Mahfud. *Politik Hukum Di Indonesia*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2020.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muntoha, *Negara Hukum Indonesia: Pasca Perubahan UUD 1945*. Bantul: Kaukaba Dipantara, 2013.
- Nugroho, Sigit Sapto, and Anik Tri Haryani. *Metodologi Riset Hukum*. Lakeisha, Klaten, 2020.
- Pureklolon, Thomas T. *Demokrasi Dan Politik Menelisik Dinamika Kekuasaan, Sosial, Budaya Dan Pancasila*. Malang: Intrans Publishing, 2019.

Putra. Andi Irman, *Penulisan Kerangka Ilmiah tentang Peran Prolegnas dalam Perencanaan Pembentukan Hukum Nasional Berdasarkan UUD 1945*, Bappenas, Jakarta, 2008.

Ramli. Ahmad M, dkk, *Tiga Dekade Prolegnas dan Peran BPHN*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2008.

Safaat, Ali. *Modul Pendidikan Negara Hukum Dan Demokrasi*. Jakarta: Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi, 2016.

Safira, Martha Eri. *Hukum Tata Negara Dalam Bingkai Sejarah Dan Perkembangan Ketatanegaraan Di Indonesia*. Ponorogo: CV. Senyum Indonesia, n.d.

Saifudin. *Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Yogyakarta: FH UII Press, 2009.

Soemantri, Sri. *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran Dan Pandangan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.

Soimin, and Mashuriyanto. *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. UII Press, 2013.

Sampe, Stefanus. *Perbandingan Sistem Pemerintahan*. Manado: t.p, 2022.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Jurnal:

Agus, dkk. "Konfigurasi Politik Sebagai Bagian Dari Pembentukan Dan Perkembangan Hukum." *Ensiklopedia of Journal* 6 (2024).

Aidul Fitriciada Azhari. "Negara Hukum Indonesia: Dekolonisasi Dan Rekonstruksi Tradisi." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 19 (2012).

Amalia, Sundari dan Zulfatul. "Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Perspektif Demokrasi." *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 2 (2020).

Amira Atsil, Dkk. "Implikasi Praktik Autocratic Legalism terhadap Demokrasi, Keabsahan, Dan Keadilan Pada UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan." *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik* 3 (2025).

Antari, Putu Eva Ditayani. "Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Upaya Memperkuat Sistem Presidensial Di Indonesia." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 4 (2020).

Ardhanariswari, Riris, "Keterlibatan Perempuan dalam Penyusunan Produk Hukum Daerah di Kabupaten Banyumas", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 8, No. 1 Januari 2008.

Aritonang, Dinoroy Marganda. "Penerapan Sistem Presidensial Di Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 22, no. 2 (2010): 391–407.

- Arnita. "Sistem Pemerintahan Presidensial Dalam Negara Kesatuan Republik Indoensia." *Jurnal Transformasi Administrasi* 10 (2020).
- Arsil, Fitra. *Teori Sistem Pemerintahan Pergeseran Konsep Dan Saling Kontribusi Antar Sistem Pemerintahan Di Berbagai Negara*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2019.
- Artioko, Fiqih Rizki. "Pengadopsian Partisipasi Masyarakat Yang Bermakna (Meaningful Participation) Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 6 (2022).
- Cali, Basak. "Autocratic Strategies and the European Court of Human Rights." *European Convention on Human Rights Law Review* 1 (2021). <https://doi.org/https://doi.org/10.1163/26663236-bja10015>.
- Chandranegara, Ibnu Sina. "Penuangan Checks and Balances Kedalam Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 13 (2016).
- Daliwu, Sri Wahyuni Laia dan Sodialman. "Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis Dalam Pembentukan Undang-Undang Yang Bersifat Demokratis Di Indonesia." *Jurnal Education and Development* 10 (2022).
- Dedi, Agus. "Implementasi Prinsip- Prinsip Demokrasi Di Indonesia." *Jurnal Moderat* 7 (2021).
- Dondokambey, Sarah Malena Andrea. "Penerapan Prinsip Partisipasi Masyarakat Bermakna (Meaningful Participation) Dalam Pembentukan Peraturan Daerah." *Lex Privatum* 11, no. 2 (2023).
- Efriza. "Koalisi Dan Pengelolaan Koalisi, Pada Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla." *Politica* 9 (2018).
- Egi Fauzi, Dkk. "Konsep Partisipasi Publik Yang Bermakna Sebagai Pencegahan Gejala Autocratic Legalism Di Indonesia." *Reformasi* 14 (2024).
- Fahira, Yumna. "Sistem Checks and Balances Dalam Menjaga Prinsip Demokrasi Di Indonesia." *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3 (2025).
- Fauzan. Muhammad, dkk, "Democratic State Of Law In A Post-Colonialism State: An Analysis Of The Identity Of Indonesian And Malaysian Constitution", *Journal of Critical Reviews*, Vol. 7, Issue 6, 2020.
- Fauzi, Iswari. "Aplikasi Konsep Negara Hukum Dan Demokrasi Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia." *JCH: Jurnal Cendekia Hukum* 6 (2020).
- Fazrin, Asyifa Rahmadina. "Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPR RI Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2016." Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2018.
- Fika Lestari, Dkk. "Urgensi Fast Track Legislation Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 2024.

- Fikri Wahyudin, Dkk. "Efektivitas Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia." *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 1 (2019).
- Firdaus, Muhammad Taufiq. "Urgensi Paradigma Legisprudence: Praktik Abusive Legislation Dalam Revisi Undang-Undang Kementerian Negara." *Jurnal APHTN HAN* 4 (2025).
- Fitria. "Penguatan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Melalui Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1954 Tentang Hak Angket." *Jurnal Cita Hukum* II (2014).
- Hadinatha, Miftah Faried. "Peran Mahkamah Konstitusi Mencegah Gejala Autocratic Legalism Di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 19 (2022).
- Hamzani, Achmad Irwan. "Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya." *Yustisia*, 2014.
- Hariri, Nazdirulloh dan Achamd. "Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Bertentangan Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Tentang Cipta Kerja." *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 6 (2023).
- Harry Setya Nugraha, Dkk. "Meaningful Participation Dalam Pembentukan Undang-Undang Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang." *Jurnal APHTN HAN* 2 (2024).
<https://doi.org/https://doi.org/10.55292/vrrsqy14>.
- I Gusti Ngurah Krisna Arimbawa, Dkk. "Rekonstruksi Prinsip Check and Balance Dalam Kerangka Hukum: Membangun Fondasi Kekuasaan Yang Seimbang." *Rio Law Jurnal* 5 (2024).
- Irfa'i, Nia Hasna Triadi dan. "Analisis Perpu Sebagai Salah Satu Jenis Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011." *Limbago: Journal of Constitutional Law* 2 (2022).
- Irwansyah, Mahmuzar Hasibuan dan. "Evaluasi Implementasi Periode 'Lame Duck' Di Indonesia Sejak Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 1945 Hingga Saat Ini." *Jurnal Educatio* 9 (2023).
- Isaliani, Thimoty Pradhitya, and Sunny Ummul Firdaus. "Konsep Koalisi Partai Politik Dalam Sistem Presidensial Indonesia." *Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik* 4, no. 2 (2020): 221–32.
- Iswandi, Septi Nur Wijayanti dan Kelik. "Sinergitas Kabinet Presidensiil Multipartai Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 18 (2021).
- Itok Dwi Kurniawan, dkk. "Keterlibatan Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Sebagai Bentuk Impementasi Demokrasi." *Jurnal Analisis Hukum* 6 (2023).
- Jane Theresia Silaban, dkk. "Persepsi Mahasiswa Fisip Undip Terhadap Demokratisasi Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2013.

- Jati, Rahendro. "Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Yang Responsif." *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 1 (2012).
- Karsa, Iyan Barlian dan Pipih Ludia. "Fungsi Dan Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Secara Konstitusionalitas Dalam Penyelenggaraan Negara Pasca Reformasi." *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 3 (2023).
- Kuntana Magnar, Dkk. *Hukum, Hak Asasi Dan Demokrasi*. Bandung: Pusat Studi Kebijakan Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2019.
- Kusmanto, Heri. "Partisipasi Masyarakat Dalam Demokrasi Politik." *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA* 2 (2014).
- Lailam, Tanto. "Problem Dan Solusi Penataan Checks and Balances System Dalam Pembentukan Dan Pengujian Undang-Undang Di Indonesia." *Negara Hukum* 12 (2021).
- Lestari, Amanda Dea. "Implikasi Sistem Multipartai Terhadap Sistem Presidensi Indonesia." *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 6 (2022).
- Lumintang, Adelia Fernanda Lawani dan Delasnova S.S. "Hubungan Legislatif dan eksekutif Dalam Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Lex Administratum IX* (2021).
- M, N. Nihaya. "Demokrasi Dan Problematikanya Di Indonesia." *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman* 10 (2016).
- Mandak, Ardila Putri Ananda. "Penerapan Partisipasi Masyarakat Bermakna Dalam Pembentukan Undang-Undang Pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/Puu-Xviii/2020." *Lex Privatum: Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT* 13 (2024).
- Marpaung, Lintje Anna. "Pengaruh Konfigurasi Politik Terhadap Karakter Produk Hukum (Suatu Telaah Dalam Perkembangan Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia)." *Pranata Hukum* 7 (2012).
- Muchlas. "Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Terhadap Pelaksanaan Kinerja Eksekutif." *Jurnal Negara Dan Keadilan* 7 (2018).
- Muntoha. "Demokrasi Dan Negara Hukum." *Jurnal Hukum* 16 (2009).
- Muslimah. "Politik Hukum Perencanaan Program Legislasi Nasional Di Indonesia." *Jurnal Akmen*, 2015.
- Nur Aji Pratama. "Meaninful Participation Sebagai Upaya Kompromi Idee Des Recht Pasca Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020." *Jurnal Crepido* 4 (2022).
- Nurhasim, Sri Yuniarti dan Moch. "Mencari Sistem Pemilu Dan Kepartaian Yang Memperkuat Sistem Presidensial." *Jurnal Penelitian Politik* 10 (2013).
- Nursetiawan. Eko dan Riris Ardhanariswari, "Meaningful Participation in Legislative Drafting as a Manifestation of a Democratic Rule of Law", *Jambe*

Law Journal, Vol. 5, No. 2, 2020.

- Octovina, Ribkha Annisa. "Sistem Presidensial Di Indonesia." *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 4 (2018). <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v2i2.xxxxxx>.
- Ofis Rikardo, Dkk. "Konstitusionalitas Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja." *Jurnal Dedikasi Hukum* 3 (2024).
- Oksalin Girysvia Ulaan, Dkk. "Fungsi Legislasi Dalam Periode Lame Duck Session Dalam Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia." *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat* 13 (2024).
- Pakpahan, Caroline Gabriela, dkk, "Quo Vadis: Konsep Meaningful Participation sebagai Implikasi Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 dalam Menunjang Hak Konstitusional", *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Vol. 10, No. 4.
- Pangaribuan, Refo Rivaldo Fransiscus, Toar Neman Palilingan, and Feiby S Mewengkang. "Pembagian Kekuasaan Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia." *Lex Administratum* 11, no. 5 (2023).
- Rahmat Said, dkk. "The Phenomena of Autocratic Legalism In The Post-Covid-19 Pan Demic And How The Constitutional Ourt Has A Role As Guardian Of The Constitution." *Journal of Interdisciplinary Law and Legal* 2 (2024).
- Retno Mawarini Sukmariningsih. "Penataan Lembaga Negara Mandiri Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 26 (2014).
- Ridlwan, Zulkarnain. "Cita Demokrasi Indonesia Dalam Politik Hukum Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Pemerintah." *Jurnal Konstitusi* 12 (2015).
- Rishan, Sultan Zora Fernanda dan Idul. "Dampak Revisi Undang-Undang KPK Terhadap Independensi Dan Efektivitas KPK Dalam Pemberantasan Korupsi." *Pakar (Pakuan Law Review)* 10 (2024).
- Rohmah. Siti, "Produk Legislasi pada Lame Duck Session (Sesi Lame duck) dalam Ketatanegaraan Indonesia Periode 2014 dan 2024", *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2025.
- Rohman, Fandi Nur. "Model Carry Over Dalam Pembentukan Undang-Undang." *Lex Renaissance* 2 (2022).
- Salsabiila Tiara Aulia, dkk. "Tinjauan Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Berdasarkan Prosedur Dan Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik." *Padjajaran Law Review* 10 (2022).
- Santoso, M. Agus. "Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan." *Jurnal Hukum* 18 (2011).
- Sihotang, Januari. "Penataan Pengawasan DPR Terhadap Presiden Dalam Rangka Penguatan Sistem Presidensial Indonesia." *Fundamental: Jurnal Ilmu Hukum*

13 (2024).

- Simamora, Janpatar. "Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 3 (2014): 547–561
- Solihan makruf, Dkk. "Analisis Kritis Terhadap Peran Dan Efektivitas Prolegnas Dalam Pembentukan Kebijakan Hukum Di Indonesia: Sebuah Pendekatan Teoritis Dan Praktis." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 4 (2024).
- Sudirman, Sudirman. "Kedudukan Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial (Telaah Terhadap Kedudukan Dan Hubungan Presiden Dengan Lembaga Negara Yang Lain Dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945)." Brawijaya University, 2014.
- Suhendarto. Bonaventura Pradana dan Benediktus Hestu Cipto Handoyo, "Partisipasi yang Bermakna dan Analisis Dampak Peraturan dalam Perundang-Undangan Berdasarkan Perspektif Demokrasi Deliberatif Habermas", *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 2, April 2025.
- Sunarto. "Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dpr (Perbandingan Antara Era Orde Baru Dan Era Reformasi)." *Integralistik* 1 (2018).
- Supardan, Dadang. "Sejarah Dan Prospek Demokrasi." *Sosio Didaktika: Social Science Education Journal* 2 (2015).
- Syamsir, Hirma dan. "Kajian Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Tentang Undang-Undang Cipta Kerja." *Limbago: Journal of Constitutional Law* 3 (2023).
- Thohari, A Ahsin. "Mahkamah Konstitusi Dan Pengokohan Demokrasi Konstitusional Di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 6, no. 3 (2009): 95–108.
- Wafa, Muhamad Khoirul, "Peran dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang", *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 03, No. 1, Januari-Juni 2023.
- Wahyuni. Sri, dkk, "Analisis Dinamika Legislasi pada Periode Lama Duck dalam Kepemimpinan Politik di Indonesia", *Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara*, Vol. 2, No. 2, Desember 2025.
- Wangku, Julian A. dkk, "Implementasi Prinsip Meaningful Participation dalam Revisi Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia", *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, Vol. 2, No. 3, Oktober 2025.
- Wardaya, Manunggal K. "Perubahan Konstitusi Melalui Putusan MK: Telaah atas Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 2, April 2010.
- Wattimury, Eivandor dan Alfian Reymon Makaruku, "Partisipasi Bermakna dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Seram Bagian Barat", *J-CEKI:*

Jurnal Cendekia Ilmiah, Vol. 4, No. 2, Februari 2025.

Yamani, Muhammad Ardian Maulana Azmi dan Akhmad Zaki. "Peran Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang (Analisis Dampak Dan Manfaat)." *Interdisciplinary Explorations in Research Journal (IERJ)* 3 (2025).

Yani, Ahmad. "Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori Dan Praktik." *Lentera Hukum* 5 (2018).

Yunus, Nur Rohim. "Aktualisasi Demokrasi Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara." *Jurnal Sosio Didaktika: Social Science Education Journal* 2 (2015).

Yusdianto. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Program Legislasi Daerah." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 5 (2012).

Войчук, А. "The System Of Checks And Balances In A Presidential Republic." *Вісник НТУУ "КПІ" Політологія. Соціологія. Право*, no. 1 (65) (2025): 78-82.

Website:

Anonim. "Perjalanan Omnibus Law Cipta Kerja Hingga Menjadi UU." *Indonesiabaik.id*, n.d. <https://indonesiabaik.id/infografis/perjalanan-omnibus-law-cipta-kerja-hingga-menjadi-uu>.

———. "Respon Atas Rencana Penetapan Revisi UU ITE: Lima Masalah Krusial Dalam Revisi UU ITE Yang Mengancam Kebebasan Ekspresi Di Indonesia." *ICJR*, 2016. <https://icjr.or.id/respon-atas-rencana-penetapan-revisi-uu-ite-lima-masalah-krusial-dalam-revisi-uu-ite-yang-mengancam-kebebasan-ekspresi-di-indonesia/>.

———. "Revisi UU Mahkamah Konstitusi Dinilai Cacat Formil." *Jantera*, n.d. <https://www.jentera.ac.id/kabar/revisi-uu-mahkamah-konstitusi-dinilai-cacat-formil>.

Belarminus, Tria Sutrisna dan Robertus. "Kilas Balik DPR Utak-Utik Syarat Usia Calon Kepala Daerah 2024." *Kompas.com*, 2025. <https://nasional.kompas.com/read/2025/09/29/10394011/kilas-balik-dpr-utak-atik-syarat-usia-calon-kepala-daerah-2024?page=all>.

DA, Ady The. "Baleg DPR Lebih Memilih Putusan MA Ketimbang MK Soal Batasan Usia Calon Kepala Daerah." *Hukumonline*, 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/baleg-dpr-lebih-memilih-putusan-ma-ketimbang-mk-soal-batas-usia-calon-kepala-daerah-lt66c5d09a26ad4/?page=all>.

———. "Akademisi Ini Beberkan 3 Kejanggalan Perppu Cipta Kerja." *Hukumonline*, 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/akademisi-ini-beberkan-3-kejanggalan-perppu-cipta-kerja-lt63d8ad6ad9e75/>.

———. "Akademisi Ini Beberkan 3 Kejanggalan Perpu Cipta Kerja." *Hukumonline*, 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/akademisi-ini-beberkan-3-kejanggalan-perppu-cipta-kerja-lt63d8ad6ad9e75/?page=1>.

- Detikcom, Tim. "Superkilat, Ini Kronologi 13 Hari DPR-Jokowi Revisi UU KPK." Detiknews, 2019. <https://news.detik.com/berita/d-4709596/superkilat-ini-kronologi-13-hari-dpr-jokowi-revisi-uu-kpk>.
- Elnizar, Norman Edwin. "Tafsir 'Kegentingan Yang Memaksa' Masih Bisa Berubah." Hukumonline, 2017. <https://www.hukumonline.com/berita/a/tafsir-kegentingan-yang-memaksa-masih-bisa-berubah-lt598c17fce43f8/>.
- Fadhilah. "Daftar 5 UU Kontroversial Yang Disahkan Pemerintahan Joko Widodo, Apa Saja?" Kompas, 2020. <https://www.kompas.tv/amp/nasional/113726/daftar-5-uu-kontroversial-yang-disahkan-pemerintahan-jokowi-apa-saja?page=all>.
- Farisa, Fitria Chusna. "Jejak Kontroversi UU Cipta Kerja: Disahkan Kilat, Perppu Diketok Meski Banjir Penolakan." Kompas.com, 2023. <https://nasional.kompas.com/read/2023/03/21/14021541/jejak-kontroversi-uu-cipta-kerja-disahkan-kilat-perppu-diketok-meski-banjir?page=all>.
- Galih, Haryanti Puspa Sari dan Bayu. "DPR Sahkan 91 Undang-Undang Selama Masa Bakti 2014-2019." Kompas.com, 2019. <https://nasional.kompas.com/read/2019/10/01/05340051/dpr-sahkan-91-undang-undang-selama-masa-bakti-2014-2019>.
- Hanan, Djayadi. "Efektifitas Koalisi Jokowi." Saiful Mujani: Research & Consulting, 2016. <https://saifulmujani.com/efektifitas-koalisi-jokowi/>.
- Haryatmoko. "Autocratic Legalism Undermines Pancasila." Kompas, 2025. <https://www.kompas.id/artikel/en-legalisme-otokratis-merongrong-pancasila>.
- Heriani, Fitri Novia. "Jadi Polemik, PSHK Desak Pembahasan Revisi Keempat UU MK Dihentikan." Hukumonline, 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/jadi-polemik--pshk-desak-pembahasan-revisi-keempat-uu-mk-dihentikan-lt6644abd34da74/>.
- Maharani, Shinta. "Revisi UU KPK, Bola Di Tangan Tuan Presiden." Tempo.co, 2019. <https://www.tempo.co/arsip/revisi-uu-kpk-bola-di-tangan-tuan-presiden-706181>.
- Mardatillah, Aida. "Dinilai Cacat Formil, MK Diminta Batalkan Perubahan UU Minerba." Hukumonline, 2020. <https://www.hukumonline.com/berita/a/dinilai-cacat-formil--mk-diminta-batalkan-perubahan-uu-minerba-lt5f0c135528bc2/?page=2>.
- Novianti Setuningsih. "DPR Periode 2019-2024 Sahkan 225 Undang-Undang, Terbanyak Selama 15 Tahun Terakhir." Kompas.com, 2024. <https://nasional.kompas.com/read/2024/09/30/14340681/dpr-periode-2019-2024-sahkan-225-undang-undang-terbanyak-selama-15-tahun?page=all>.
- Nurhaliza, Shifa. "Ini 11 Kluster Yang Diatur Dalam Peraturan Pelaksana UU Cipta Kerja." IDX Channel.com, 2021. <https://www.idxchannel.com/economics/ini-11-kluster-yang-diatur->.
- Putra, Antoni. "Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik Dalam

Revisi Undang-Undang Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.” PSHK, n.d. <https://pshk.or.id/blog-id/pembentukan-peraturan-perundang-undangan-yang-baik-dalam-revisi-undang-undang-tentang-komisi-pemberantasan-korupsi/>.

Scheppele, Kim Lane “Autocratic Legalism”, hlm. 547-548, chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://lawreview.uchicago.edu/sites/default/files/11%20Scheppele_SYMP_Online.pdf

Triono, Aru Lego. “Tuai Penolakan Tapi Tetap Disahkan, Ini Jejak Kontroversi UU Cipta Kerja.” NU Online, 2023. <https://www.nu.or.id/nasional/tuai-penolakan-tapi-tetap-disahkan-ini-jejak-kontroversi-uu-cipta-kerja-Xx2sA>.

Tsarina Maharani, Krisiandi. “Setahun Jokowi-Ma’ruf Amin: Pengesahan 3 UU Kontroversial.” Kompas.com, 2020. <https://nasional.kompas.com/read/2020/10/20/11104601/setahun-jokowi-maruf-amin-pengesahan-3-uu-kontroversial?page=all>.

Wardah, Fathiyah. “Pakar Pertanyakan Revisi UU Pilkada Yang Abaikan Putusan MK.” voa, 2024. <https://www.voaindonesia.com/a/pakar-pertanyakan-revisi-uu-pilkada-yang-abaikan-putusan-mk/7751394.html>.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.